

PEREKONOMIAN INDONESIA TAHUN 1982: SEBUAH TINJAUAN*

Pande Radja SILALAH

PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia selalu dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang dapat dikategorikan sebagai faktor ekonomi maupun politik dan sosial. Faktor-faktor ini ada yang bersumber dari dalam negeri dan ada pula yang bersumber pada perkembangan internasional yang satu sama lain saling berpengaruh. Perkembangan dunia di bidang politik, termasuk konflik yang bersifat regional maupun global seperti perang di Timur Tengah, masalah Indocina, invasi Uni Soviet ke Afghanistan, mempunyai dampak terhadap perekonomian Indonesia.

Banyaknya faktor yang berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia tersebut menyebabkan perspektif perekonomian tahun 1982 secara jelas dan tepat sulit untuk dinyatakan. Unsur-unsur ketidakpastian yang besar menyebabkan kecenderungan-kecenderungan yang ada saat ini belum memadai dijadikan titik tolak yang mantap untuk menganalisa data yang ada menjadi perkiraan-perkiraan kuantitatif yang akurat. Dengan demikian pembahasan ini akan terbatas pada pengkajian masalah-masalah pokok dan faktor-faktor yang dianggap penting dan dominan serta mempunyai pengaruh terhadap perekonomian Indonesia pada tahun 1982, termasuk di dalamnya perkembangan perekonomian dunia, faktor-faktor dalam negeri ditinjau dari berbagai aspek.

I. PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN DUNIA

Memasuki dasawarsa 1980-an perekonomian dunia mengalami masa-masa sulit. Beberapa ahli ekonomi pada awal 1981 memperkirakan bahwa resesi

*Makalah yang disampaikan pada pertemuan ADMEN CLUB di Jakarta 14 Desember 1981

dunia akan terus berkelanjutan paling tidak sampai pertengahan tahun 1981, dan setelah itu perekonomian dunia akan bangkit kembali secara perlahan-lahan. Namun kenyataan menunjukkan bahwa kelesuan perekonomian dunia masih terus berlangsung sampai bulan-bulan terakhir tahun 1981.

Hasil studi Bank Dunia mengungkapkan bahwa resesi dunia sekarang ini telah mencapai titik paling rendah dalam siklusnya. Perekonomian dunia tampaknya akan bangkit kembali pada permulaan tahun 1982 walaupun peningkatan ini akan berjalan lebih lambat bila dibandingkan dengan pertumbuhan yang dicapai dalam pertengahan dasawarsa 1970-an. Bahkan studi ini memperkirakan bahwa untuk sepuluh tahun mendatang perekonomian negara-negara industri akan mengalami tingkat rata-rata pertumbuhan per tahun yang sedikit lebih besar daripada yang dicapai dalam 1970-an (lihat Tabel 1). Perkiraan ini mengambil asumsi bahwa negara-negara industri tersebut berhasil melakukan penyesuaian-penyesuaian struktural untuk mempertinggi produktivitas serta menghemat energi. Di samping itu penting pula artinya pengendalian tingkat inflasi sedemikian rupa sehingga perekonomian dapat berkembang dengan baik dan pengangguran berkurang.

Tabel 1

**PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK BRUTO NEGARA-NEGARA INDUSTRI,
TAHUN 1970-1990
(Persentase Rata-rata Tahunan)**

Golongan Negara dan Kawasan	Realisasi 1970-80	Proyeksi					
		Tertinggi			Terendah		
		1980-85	1985-90	1980-90	1980-85	1985-90	1980-90
Negara Industri Perekonomian Pasar	3,3	3,3	4,0	3,6	2,6	3,0	2,8
- Amerika Utara, Jepang, Oceania	3,6	3,6	4,2	3,9	2,9	3,2	3,1
- Eropa Barat	2,8	3,0	3,6	3,3	2,2	2,7	2,4
Negara Industri Perekonomian Non-Pasar	4,8	4,0	3,8	3,9	3,8	3,6	3,7

Sumber: *World Development Report 1981*, The World Bank, Washington, D.C., Agustus 1981, hal. 10.

Faktor-faktor penting yang berpengaruh terhadap perdagangan dunia yang harus diperhatikan adalah tingkat pertumbuhan negara-negara industri dan kebijakan proteksi, yang satu sama lain saling berkaitan. Negara-negara

bahan negara-negara industri. Apabila laju pertumbuhan ekonomi negara-negara maju berkurang, maka akibatnya ekspor bahan baku dari negara berkembang akan berkurang pula, demikian pula sebaliknya, semakin tinggi tingkat pertumbuhan yang dicapai oleh negara maju, maka akan semakin cerah pula prospek ekspor negara-negara berkembang.

Tabel 2

PERTUMBUHAN PRODUK NASIONAL BRUTO RIIL NEGARA-NEGARA OECD¹
(Persentase Tahunan)

	1979 Bagian dari Total	Rata- rata 1969- 1979	Dari Tahun-tahun Sebelumnya		
			1980	1981	1982
Amerika Serikat	34,8	2,9	-0,2	2,5	1
Jepang	14,7	5,4	4,2	3,5	4
Jerman	11,2	3,2	1,8	-1,5	2
Perancis ²	8,4	4,0	1,3	-0,5	1,75
Inggris ²	6,0	2,2	-1,8	-1,5	0,25
Italia ²	4,7	3,3	4,0	-0,75	1,75
Kanada	3,3	4,2	0,1	2,5	2,25
Jumlah Negara-negara tersebut di atas	83,0	3,5	1,2	1,25	1,75
Negara-negara OECD lain	17,0	3,5	1,9	1,25	3
Jumlah total OECD	100,0	3,5	1,3	1,25	2
Empat Negara-negara Eropa terpenting	30,3	3,2	1,3	-1	1,5
Jumlah total OECD dikurangi Amerika Serikat	65,2	3,8	2,0	0,75	2,5
Produksi industri					
Tujuh negara terpenting	-	3,4	-0,6	1,5	2,75
Jumlah total OECD	-	3,4	-0,2	1,25	3

Catatan: ¹Rata-rata dihitung dengan basis Produk Nasional Bruto/Produk Domestik Bruto 1979, nilai-nilai dinyatakan dalam US Dollar 1979.

²Produk Domestik Bruto.

Sehubungan dengan itu, keputusan negara-negara yang tergabung dalam OPEC untuk membekukan harga minyaknya sampai akhir tahun 1982, tampaknya memperkuat keyakinan para ahli ekonomi bahwa perekonomian dunia akan mulai cerah tahun depan. Negara-negara yang tergabung dalam OECD diperkirakan akan mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar kira-kira 2% dalam tahun 1982. Angka ini ternyata lebih besar dari angka yang dicapai dalam tahun sebelumnya yaitu kira-kira 1,25%. Tampaknya terdapat perbedaan pertumbuhan yang cukup bervariasi antara satu negara dan negara anggota lainnya (lihat Tabel 2). Diperkirakan tahun mendatang Jepang memiliki tingkat pertumbuhan riil yang tertinggi di antara negara-negara OECD lainnya, yaitu 4%. Sebagian besar negara-negara yang tergabung dalam OECD diperkirakan akan mengalami pertumbuhan riil lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, kecuali untuk Amerika Serikat.

Pertumbuhan ekonomi suatu negara juga tercermin pada perkembangan ekspor-impornya. Selama tahun 1976 sampai tahun 1980 terjadi peningkatan baik ekspor maupun impor pada semua negara industri. Secara absolut jumlah ekspor dan impor itu memang terus meningkat, walaupun demikian persentase peningkatan pada tahun 1980 lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya (lihat Tabel 3). Jepang merupakan suatu negara yang memiliki pertumbuhan impor yang relatif tinggi pada tahun 1980, dibandingkan dengan negara-negara lain yang memiliki tingkat pertumbuhan impor lebih rendah dari tahun sebelumnya. Hal ini dimungkinkan karena keadaan perekonomian Jepang berkembang sedemikian rupa sehingga menghasilkan pertumbuhan sekitar 4,2% pada tahun itu dan merupakan yang tertinggi di antara negara OECD lainnya. Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa Jepang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dan tergolong tinggi dibandingkan dengan negara OECD lainnya. Pada tahun 1980, Italia memiliki tingkat pertumbuhan sedikit di bawah angka yang dicapai Jepang yaitu sekitar 4% namun dalam tahun-tahun berikutnya diperkirakan negara ini bahkan akan mengalami tingkat pertumbuhan di bawah nol. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi negara-negara industri pada tahun 1982 diperkirakan jumlah ekspor-impor dunia akan mengalami peningkatan yang relatif cukup besar, lebih besar dari tingkat yang telah dicapai tahun 1981.

Tampaknya kelesuan perekonomian dunia berangsur-angsur telah mulai dapat diatasi. Walaupun demikian dalam beberapa tahun mendatang tingkat pertumbuhan ekonomi seperti yang dicapai dalam dasawarsa 1970-an belum akan tercapai. Gambaran masa mendatang yang kiranya lebih cerah ini tentu akan berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Akan tetapi, sejauh mana faktor-faktor ini akan menunjang perkembangan perekonomian In-

Tabel 3

EKSPOR IMPOR TAHUN 1976-1980
(dalam jutaan US\$)

		E k s p o r									
		1976	△ %	1977	△ %	1978	△ %	1979	△ %	1980	
Negara-negara Industri		631.900	13,26	715.700	15,68	827.900	29,28	1.070.300	19,82	1.282.400	
Amerika Serikat		116.329	23,09	143.186	16,20	166.385	21,69	202.468	15,92	234.710	
Jepang		57.192	8,12	61.837	13,21	70.005	37,32	96.129	28,90	123.915	
Asia Lain		54.009	20,77	65.226	32,17	86.212	30,52	112.521	26,38	142.204	
Afrika		26.329	12,69	29.669	11,79	33.166	16,29	38.570	29,52	49.955	
EEC		337.987	11,79	377.840	18,08	446.150	31,36	586.084	18,84	696.482	
		I m p o r									
		1976	△ %	1977	▽ %	1978	△ %	1979	△ %	1980	
Negara-negara Industri		926.400	15,21	1.067.300	16,71	1.245.600	25,95	1.568.800	23,39	1.935.800	
Amerika Serikat		120.399	6,76	128.537	19,82	154.018	26,57	194.939	24,36	242.427	
Jepang		65.159	21,35	79.073	25,78	99.456	8,57	107.984	27,00	137.137	
Asia Lain		52.465	19,08	62.476	17,45	73.376	33,81	98.185	29,44	127.090	
Afrika		24.553	22,35	30.040	11,23	33.413	24,33	41.542	19,49	49.639	
EEC		328.724	16,33	382.397	21,17	463.353	23,99	574.527	15,80	665.295	

Sumber: Direction of Trade Statistics, IMF, 1981.

II. FAKTOR-FAKTOR DALAM NEGERI KEADAAN SOSIAL POLITIK

Salah satu faktor penting yang perlu mendapat perhatian dalam memperkirakan keadaan perekonomian Indonesia pada tahun 1982 adalah keadaan sosial politik dalam negeri. Sampai akhir tahun 1981 dapat dikatakan keadaan sosial dan politik dalam negeri cukup stabil. Pada tahun 1982 Indonesia akan menyelenggarakan Pemilu, dan berdasarkan pengalaman Pemilu tahun-tahun sebelumnya diketahui bahwa menjelang dilaksanakannya kegiatan tersebut, suhu politik biasanya meningkat. Dalam situasi semacam ini para pengusaha cenderung merasakan ketidakpastian dunia usaha semakin besar. Walaupun demikian menurut pengamatan, sementara ini tampaknya keadaan politik Indonesia akan tetap stabil baik menjelang maupun sesudah dilaksanakannya Pemilu serta selama tahun 1982. Kestabilan keamanan kiranya akan cukup terjamin yang selanjutnya tercermin pada kesepakatan golongan-golongan masyarakat yang menginginkan pimpinan negara tetap dipertahankan seperti sebelumnya. Keadaan ini menguntungkan dipandang dari segi dunia usaha yang menginginkan sedapat mungkin unsur ketidakpastian dikurangi. Oleh sebab itu para pengusaha akan lebih yakin dalam menjalankan usahanya dan dalam prosesnya akan sangat membantu jalannya roda perekonomian.

Penerimaan dan Pengeluaran Negara

Minyak merupakan kunci kegiatan perekonomian Indonesia. Dibekukannya harga minyak sampai akhir tahun 1982 oleh negara-negara yang tergabung dalam OPEC tentu berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Sebagai negara yang sangat mengandalkan penerimaan dari sektor ini, mau tidak mau Indonesia harus menanggapinya secara tepat. Dalam tahun fiskal 1981/1982 penerimaan dari Pajak Perseroan Minyak merupakan 61,69% dari seluruh total penerimaan negara atau merupakan hampir 70% dari seluruh penerimaan dalam negeri.

Dibekukannya harga minyak itu sebenarnya tidak secara otomatis berarti bahwa penerimaan pemerintah dari Pajak Perseroan Minyak akan tetap, malahan sebenarnya masih mungkin ditingkatkan lagi. Jumlah sumur minyak yang dibor pada tahun 1979 sudah mencapai kira-kira 200 buah, dan dalam tahun 1981 diperkirakan kira-kira 300 buah. Bila pengeboran-pengeboran yang dilakukan berhasil, maka tidak mustahil produksi minyak akan meningkat dari kira-kira 1,58 juta barrel sehari menjadi sedikit di atas 1,60 juta barrel

Dalam tiga tahun anggaran terakhir ini penerimaan negara dari Pajak Perseroan Minyak tidak pernah meningkat di bawah 20%. Meskipun demikian dalam tahun anggaran 1982/1983 peningkatan seperti ini sulit untuk dicapai, walaupun ada kemungkinan mulai tahun 1983 akan terjadi kenaikan harga minyak. Dalam keadaan semacam ini penerimaan dari sektor-sektor lainnya dapat ditingkatkan. Akan tetapi usaha ini diperkirakan hanya akan memberikan hasil yang tidak begitu besar bagi penerimaan pemerintah secara keseluruhan. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa penerimaan pemerintah dalam tahun anggaran 1982/1983 tidak akan meningkat lebih besar daripada tingkat yang dicapai dalam tahun anggaran sebelumnya. Angka peningkatan sekitar 10% kiranya merupakan jumlah peningkatan yang paling mungkin dapat dicapai.

Peningkatan penerimaan dari sektor nonminyak seharusnya sudah dilakukan atau paling tidak dipersiapkan sebelumnya karena Indonesia tidak mungkin terus menerus bergantung kepada sektor minyak. Untuk mencapai tujuan ini sudah barang tentu dibutuhkan perubahan-perubahan, baik yang menyangkut peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku, penerapan maupun obyeknya. Perubahan tarif memang dapat merupakan salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan sektor pajak. Akan tetapi dilihat dari segi kepentingan jangka panjang dan dikaitkan dengan beberapa faktor seperti usaha peningkatan kesadaran anggota masyarakat untuk memenuhi kewajibannya, maka di samping perubahan tarif tersebut, usaha untuk melibatkan lebih banyak anggota masyarakat perlu dilakukan. Keengganan untuk melakukan usaha seperti ini khususnya yang menyangkut pajak pendapatan memang selalu timbul sesudah memperkirakan hasil yang akan dicapai dan biaya administrasi yang akan dikeluarkan. Namun pertimbangan semacam ini hendaknya jangan dijadikan faktor penghambat utama pelaksanaan usaha tersebut. Sudah saatnya unsur pendidikan kepada masyarakat dalam hal pajak ditanamkan agar kelak perpajakan tidak menjadi bumerang atau merupakan hambatan besar pada tahun-tahun mendatang.

Peningkatan penerimaan pemerintah yang lebih rendah dari dua tahun anggaran sebelumnya (tidak kurang dari 45%), sudah tentu akan terpantul pada pengeluaran pemerintah. Dalam keterangannya di depan sidang DPR dalam bulan Nopember 1981, Menteri Keuangan Ali Wardhana mengemukakan bahwa biaya rutin dalam tahun anggaran 1982/1983 akan meningkat, walaupun peningkatannya tidak lebih besar dari kira-kira 5% dari anggaran tahun sebelumnya. Peningkatan ini merupakan peningkatan yang terkecil selama beberapa tahun belakangan ini (lihat Tabel 4). Dalam lima tahun terakhir ini belanja pegawai/pensiun meningkat dengan tingkat pertumbuhan di atas 12%. Untuk tahun anggaran 1982/1983 peningkatan belanja pegawai/

REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN NEGARA
(Dalam milyar rupiah; dan persentase pertumbuhannya)

	1976/77	%	1977/78	%	1978/79	%	1979/80	%	1980/81
PENERIMAAN									
<i>Penerimaan Dalam Negeri</i>	2.906	21,68	3.536	20,64	4.266	56,99	6.697	52,71	70.227
<i>Pajak Langsung</i>	2.047	22,67	2.511	19,32	2.996	71,95	5.130	60,43	8.230
<i>Pajak Pendapatan</i>	84	23,81	104	17,31	122	21,31	148	10,81	164
<i>Pajak Perseroan</i>	127	33,86	170	33,53	227	30,84	297	50,84	448
<i>Pajak Perseroan Minyak</i>	1.620	20,31	1.949	18,47	2.309	84,50	4.260	64,79	7.020
<i>Lain-lain</i>	216	33,33	288	17,71	339	25,37	425	40,71	598
<i>Pajak Tidak Langsung</i>	741	18,89	881	22,36	1.078	28,01	1.380	21,81	1.681
<i>Penerimaan Non-Tax</i>	118	22,03	144	33,33	192	-2,60	187	68,98	316
<i>Penerimaan Pembangunan</i>	784	-1,40	773	33,89	1.035	33,43	1.381	8,18	1.494
<i>Jumlah</i>	3.690	16,78	4.309	23,02	5.301	52,39	8.078	45,10	11.721
PENGELUARAN									
<i>Utang</i>	1.630	31,84	2.149	27,69	2.744	48,03	4.062	42,79	5.800
<i>Pinjaman Pegawai</i>	637	40,19	893	12,21	1.002	41,72	1.420	42,46	2.023
<i>Pinjaman Barang</i>	340	10,88	377	11,14	419	35,80	569	17,93	671
<i>Subsidi-subsidi Daerah</i>	313	53,04	479	8,98	522	28,35	670	45,67	976
<i>Pinjaman/cicilan utang</i>	189	20,63	228	134,65	535	27,85	684	14,77	785
<i>Pinjaman-lain pengeluran rutin</i>	151	13,91	172	54,65	266	170,30	719	87,07	1.345
<i>Subsidi impor pangan</i>	39	-100	-	100	44	184,09	125	124,80	281
<i>Subsidi bahan bakar minyak</i>	-	100	65	203,08	197	171,57	535	91,03	1.022
<i>Pembangunan</i>	2.054	5,01	2.157	18,45	2.555	59,10	4.014	47,38	5.916
<i>Departemen/Lembaga, Hankam</i>	590	26,27	745	14,23	851	73,91	1.480	71,15	2.533
<i>Pembangunan Daerah</i>	285	28,42	366	17,76	431	27,38	549	47,18	808
<i>Pengeluaran Pembangunan Lainnya</i>	405	-23,95	308	7,14	286	133,92	669	71,15	1.145
<i>Pembangunan Proyek</i>	774	4,65	738	33,74	987	33,33	1.316	8,66	1.430
<i>Jumlah</i>	3.684	16,88	4.306	23,06	5.299	52,41	8.076	45,07	11.716

nya tidak akan lebih besar daripada peningkatan dalam tahun anggaran sebelumnya.

Dengan demikian pengeluaran rutin lainnya mau tidak mau harus ditekan. Pos-pos yang mungkin mendapat penekanan adalah belanja barang (dalam dan luar negeri), subsidi daerah otonom subsidi impor pangan, dan subsidi bahan bakar minyak. Dalam tahun anggaran 1981/1982 keempat pos pengeluaran ini masing-masing merupakan 13,25%; 16,12%; 4,13% dan 20,14% dari pengeluaran rutin atau masing-masing 7,15%; 8,70%; 2,23% dan 10,87% dari total pengeluaran pemerintah. Beban subsidi ini sudah terasa sangat berat dan sebenarnya cukup beralasan untuk menekan subsidi tersebut. Namun demikian dalam usaha seperti ini berbagai macam faktor perlu dipertimbangkan. Faktor keadilan dan atau kepatutan yang selaras dengan usaha pemerataan perlu lebih diperhatikan.

Dalam rangka mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pengeluaran pembangunan harus mengalami peningkatan. Dalam tahun anggaran 1981/1982 pengeluaran pembangunan meningkat sebesar 8,18%. Dalam tahun anggaran 1982/1983 peningkatan sebesar ini mungkin dicapai bahkan dengan memperkirakan kenaikan pendapatan pemerintah dapat mencapai 10%, maka pengeluaran pemerintah untuk pembangunan diharapkan dapat melampaui angka yang dicapai tahun anggaran sebelumnya atau mencapai angka sekitar 15-16%. Apabila dalam tahun 1981/1982 peningkatan pengeluaran rutin lebih besar (29,33%) daripada peningkatan pengeluaran pembangunan maka dalam tahun anggaran yang akan datang gambarannya akan terbalik. Keadaan semacam ini memang merupakan keadaan yang lebih baik.

Keadaan Produksi

Tersedianya bahan pangan baik dari segi jumlah maupun dari segi harga yang memadai amat penting artinya dalam mempertahankan kestabilan nasional. Perkiraan terakhir mengenai produksi beras dalam tahun 1981 adalah sekitar 22,16 juta ton. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya dicapai peningkatan sebesar 9,5%. Keadaan stok nasional mencapai 2,3 juta ton c.q. beras dan cadangan sebesar ini mampu memenuhi kebutuhan selama 100 hari apabila terjadi kegagalan panen. Dalam tahun 1981 kita masih mengimpor sebesar 500.000 ton untuk menambah kebutuhan stok.

Dewasa ini 70% dari areal tanam sudah mengalami intensifikasi khusus.

masih rendah bila dibandingkan dengan Korea (4 ton/ha) dan Jepang (6 ton/ha). Secara nasional produksi rata-rata masih dapat ditingkatkan menjadi 3-4 ton/ha dengan jalan meningkatkan jumlah areal intensifikasi dan intensifikasi khusus. Apabila dalam tahun 1981 produksi meningkat sebesar 9,5% maka tampaknya peningkatan seperti itu tidak bisa diulangi lagi untuk tahun depan. Hal ini dikarenakan peningkatan areal intensifikasi dan intensifikasi khusus yang kecil. Kemungkinan perkembangan produksi beras untuk tahun 1982 akan sesuai dengan target dari Menteri Pertanian yaitu kira-kira sebesar 4,5%. Ini berarti produksi akan mencapai 23,16 juta ton dan jumlah ini masih belum dapat memenuhi kebutuhan yang diperkirakan akan mencapai 23,55 juta ton. Kebutuhan sebanyak ini diperkirakan akan bertitik tolak dari anggapan bahwa peningkatan jumlah penduduk kira-kira sebesar 2,3% peningkatan konsumsi beras per kapita sebesar 6,8% dan income elasticity of demand sebesar kira-kira 0,319.

Perkiraan seperti ini memberi indikasi bahwa tahun depan kita masih akan mengimpor beras sebanyak 0,30-0,75 juta ton untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sebesar kira-kira 0,28 juta ton dan selebihnya untuk memperkuat stok.

Di lain pihak produksi jagung dalam tahun 1981 diperkirakan mencapai 4,6 juta ton. Dengan produksi sebesar ini saja sudah terasa sulit untuk memasarkannya. Ini disebabkan konsumsi jagung dalam negeri masih sangat rendah sedangkan harga produk di luar negeri lebih rendah. Dalam Pelita III, peningkatan produksi komoditi ini juga merupakan salah satu sasaran. Secara teknis ini dapat dicapai melalui usaha ekstensifikasi dan intensifikasi. Produksi rata-rata jagung di Indonesia baru mencapai kira-kira 1,44 ton/ha dan ini masih lebih rendah dibandingkan dengan produksi yang dicapai oleh Thailand (2,5 ton/ha) dan Malaysia (2,2 ton/ha). Dengan menggunakan bibit unggul sebenarnya produksi sebesar 4 ton/ha masih mungkin untuk dicapai. Tetapi masalah pokok yang terutama diperkirakan akan dihadapi pada tahun 1982 adalah masalah pemasaran. Tanpa peningkatan permintaan dalam negeri yang cukup berarti, produksi jagung akan sulit untuk ditingkatkan. Ada kemungkinan apabila masalah ini tidak berhasil ditanggulangi produksi jagung bahkan akan merosot pada tahun-tahun mendatang.

Produksi ubikayu bila dikelola dengan baik dapat mengalami peningkatan yang berarti. Peningkatan seperti ini akan dapat dicapai dengan jalan ekstensifikasi dan intensifikasi. Sampai sekarang produksi rata-rata ubikayu di Indonesia masih tergolong rendah, yaitu sekitar 9,6 ton/ha, dibandingkan Thailand 14,8 ton/ha dan Malaysia 21,6 ton/ha. Beberapa daerah di Indonesia menunjukkan bahwa produksi sebesar 20 ton/ha dapat dicapai.

ini mungkin terjadi dan ekspor ke negara-negara MEE masih dapat ditingkatkan mengingat bagian Indonesia masih 10% dari kebutuhan MEE sedangkan Thailand dapat mensuplai 80% dari kebutuhan itu.

Demikian pula, secara teknis hasil perkebunan seperti kopi, teh, bungkil kopra, karet masih dapat ditingkatkan dalam tahun 1982. Namun demikian perkembangan harga di pasaran internasional yang cenderung menurun dan sampai saat ini belum menunjukkan gejala akan segera meningkat, menyebabkan peningkatan produksi komoditi tersebut dalam jumlah yang cukup berarti sulit untuk diharapkan terjadi pada tahun mendatang (lihat Tabel 5).

Tabel 5

TREND HARGA KOMODITI-KOMODITI PENTING
(Dalam US\$ untuk setiap 1 ton)

Tahun/bulan	Kayu	Karet	Kopi	Timah
1977	61,0	685,6	3764,8	9441,6
1978	62,4	784,7	2287,5	11775,7
1979	119,4	1036,4	2841,1	14453,0
1980	146,2	1139,5	2735,0	14809,7
1981*	136,8	1037,7	1723,7	13152,8
Januari	139,5	1106,8	2055,7	18756,2
Pebruari	136,9	1112,2	2087,2	11176,5
Maret	132,7	1120,3	1989,9	12432,2
April	143,1	1071,2	1725,5	13204,1
Mei	130,5	1044,9	1789,8	12703,9
Juni	135,1	1011,8	1727,8	11841,9
Juli	130,9	949,8	1392,3	11870,0
Agustus	142,1	939,6	1426,2	16314,8
September	144,9	908,9	1518,5	11955,6

Catatan: * Untuk tahun 1981 hanya sampai dengan bulan September

Sumber: Diolah dari Laporan Mingguan Bank Indonesia No. 1175, 5 Nopember 1981.

Produksi di sektor industri manufaktur akan mengalami peningkatan yang cukup pesat pada tahun 1982. Industri yang mengolah hasil-hasil pertanian dan industri-industri yang menghasilkan barang-barang kebutuhan rumah tangga dalam tahun 1982 dapat diperkembangkan. Oleh sebab itu dapat diharapkan industri-industri itu dapat mulai menunjukkan hasilnya sehingga pertumbuhan sebesar sekitar 10% dapat diharapkan terjadi. Walaupun demikian, ini tidak lantas berarti bahwa tenaga kerja yang akan

sektor ini sampai sekarang masih rendah. Mengingat sasaran ganda yang dapat dicapai sekaligus melalui sektor ini antara lain sebagai penampung tenaga kerja, maka faktor elastisitas penyerapan tenaga kerja ini patut mendapatkan perhatian yang serius pada masa mendatang.

Produksi di sektor pertambangan tampaknya tidak akan mengalami peningkatan yang relatif tinggi dan diperkirakan akan mencapai peningkatan yang tidak banyak berbeda dengan yang ditargetkan dalam Repelita III sekitar 4%.

Kegiatan ekonomi di sektor bangunan, pengangkutan, komunikasi dan perdagangan dalam tahun 1982 cenderung mengalami peningkatan. Ini disebabkan oleh keadaan perekonomian 1982 yang menuntut peningkatan kegiatan di sektor ini. Diperkirakan pertumbuhan sektor-sektor ini tidak akan mengalami banyak perbedaan dari tingkat yang dicapai tahun sebelumnya.

Keuangan, Moneter dan Perbankan

Dalam penerimaan dan pengeluaran negara serta kebijaksanaan fiskal sejak Pelita I, peranan bidang keuangan/moneter amat dominan. Untuk mengendalikan inflasi yang merupakan inti dari kebijaksanaan moneter selama ini cara yang dipergunakan adalah pengendalian jumlah uang yang beredar dan tingkat pertumbuhannya. Walaupun kebijaksanaan seperti ini telah berlangsung lama, namun dengan pengamatan yang teliti sekalipun sulit untuk menentukan patokan dasar yang digunakan pemerintah dalam menentukan jumlah uang yang beredar dan penambahannya. Demikian juga halnya, berdasarkan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dilakukan sebelumnya, sampai sekarang masih dirasakan kesulitan untuk menyatakan berapa besarnya jumlah uang beredar yang tepat agar keseimbangan moneter tidak terganggu. Dalam beberapa tahun belakangan ini hal ini selalu dipertanyakan. Kiranya tanpa penjelasan dari pemerintah hal ini terus akan menjadi masalah dan pembahasan dan secara demikian pengkajian yang tepat dan akurat menjadi hampir tidak mungkin dilakukan.

Dari volume uang beserta pertambahannya sebagian besar diserap oleh pengeluaran anggaran pemerintah dan sebagian diperuntukkan sebagai cadangan untuk kebutuhan kredit oleh perusahaan milik negara. Sisa yang tersedia merupakan perkreditan untuk dunia swasta. Dengan demikian volume kredit untuk dunia swasta adalah merupakan bagian sisa dari suplai uang dan pertumbuhan dari suplai uang yang diperbolehkan beredar dalam

samping akan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi suatu negara juga dapat mengatasi kepincangan-kepincangan baik dalam pembagian pendapatan maupun dalam pembangunan antar wilayah.

Dalam rangka kebijakan pengendalian jumlah uang yang beredar, pemerintah menetapkan batas maksimum kredit yang dapat diberikan oleh bank-bank. Politik ketat di bidang perkreditan seperti ini sering dirasakan sebagai pengkekangan terhadap kegiatan-kegiatan perbankan. Hal ini semakin jelas terlihat karena bank-bank dalam beberapa tahun belakangan ini selalu mengalami kelebihan likuiditas yang cukup besar (lihat Tabel 6). Dalam keadaan seperti ini bank-bank di dalam negeri cenderung untuk hanya memberikan kredit kepada nasabah-nasabah yang dapat memenuhi persyaratan bank teknis yang ketat. Di lain pihak untuk dapat mempertahankan rentabilitasnya maka lembaga-lembaga keuangan itu cenderung untuk menempatkan likuiditasnya di pasar uang luar negeri.

Tabel 6

KELEBIHAN ALAT-ALAT LIKUID SELURUH BANK DALAM RUPIAH DAN
VALUTA ASING
(Milyar Rupiah)

Akhir Masa	Rupiah	Valuta Asing	Total	
1970	12,57	-	-	
1971	7,15	28,0	35,15	Total 1971-1980 = 26,57 kali 43,97%
1972	17,19	16,8	33,99	
1973	6,91	46,6	53,51	
1974	24,26	117,5	141,76	
1975	60,23	99,3	159,53	
1976	89,57	162,1	251,67	
1977	90,05	141,7	231,75	
1978	228,10	264,6	492,70	
1979	352,97	427,0	779,97	
1980	475,00	459,0	934,00	

Sumber: Biro Pusat Statistik, *Indikator Ekonomi*, April 1981, hal. 115-116.

Sebenarnya dalam masa pembangunan ini segenap dana yang ada harus digunakan secara efisien. Demikian pula dalam bidang perbankan sudah waktunya diadakan peninjauan terhadap kredit investasi yang ditargetkan untuk disalurkan akan tetapi pada kenyataannya realisasinya 20 hingga 30% di bawah plafond. Masalah ini memerlukan penelaahan lebih lanjut agar tidak terulang kembali pada masa mendatang. Jika pemerintah segera mengambil

diharapkan bahwa keadaan perbankan akan semakin cerah, lebih baik dari tahun sebelumnya.

Dalam tahun 1981 pemerintah telah menerapkan kebijakan perkreditan yang lebih longgar, dan hampir dapat dipastikan bahwa laju inflasi dapat ditekan di bawah 15%. Dalam tahun 1982 jumlah anggaran pemerintah tidak meningkat dalam jumlah yang cukup besar, oleh sebab itu dengan memperhitungkan faktor-faktor lainnya diperkirakan laju inflasi akan dapat ditekan dan bahkan mungkin lebih kecil dari yang dicapai dalam tahun 1981. Tetapi apakah perkiraan ini akan menjadi kenyataan akan banyak bergantung kepada tindakan yang akan diambil. Dan tindakan-tindakan itu meliputi bagaimana cara penerimaan pajak ditingkatkan, bagaimana cadangan devisa dipergunakan dan bagaimana komposisi pengeluaran pemerintah dalam tahun anggaran 1982/1983 yang akan datang.

Perkembangan Ekspor dan Impor Serta Cadangan Devisa

Sejak tahun 1971 sampai tahun 1980, ekspor Indonesia rata-rata meningkat sebesar 37,67% setiap tahun. Peningkatan tersebut untuk setiap komoditi ekspor berbeda dan dalam periode itu peningkatan ekspor minyak dan hasil-hasilnya sekitar 44% lebih besar daripada peningkatan total ekspor. Dalam perkembangannya bagian minyak dan hasil-hasilnya dalam total ekspor meningkat dari 38,74% dalam tahun 1971 menjadi 58,69% dalam tahun 1980. Dalam tahun 1981 peningkatan yang pernah dicapai dalam sepuluh tahun sebelumnya dapat dipastikan tidak akan mungkin dicapai, bahkan untuk mencapai nilai ekspor tahun 1980 tampaknya cukup sulit (lihat Tabel 7). Keadaan perekonomian dunia tercermin pada perkembangan ekspor-impornya. Kalau dilihat kembali pada Tabel 3 ternyata hampir semua negara industri perekonomian pasar mengalami penurunan tingkat pertumbuhan ekspor-impornya. Keadaan ini mencerminkan resesi dunia berakibat cukup besar dalam perkembangan perekonomian mereka sehingga mempengaruhi pula perkembangan ekspor-impornya. Bagi Indonesia pengaruh resesi itu tampak amat kuat terhadap ekspor komoditi nonminyak. Dalam tahun 1981 harga komoditi-komoditi ekspor utama Indonesia seperti kayu, karet, kopi dan timah mengalami penurunan yang cukup berarti (lihat Tabel 5). Kopi merupakan komoditi yang mengalami penurunan harga yang relatif paling banyak yaitu sekitar 37% per unit dibanding tahun 1980, disusul dengan penurunan harga-harga: timah sebesar kira-kira 11%, karet sekitar 10%; dan kayu sekitar

Tabel 7

NERACA PERDAGANGAN
(US\$ 1.000.000)

Tahun dan Bulan	Termasuk Minyak Bumi dan Hasil-Hasilnya			Tidak Termasuk Minyak Bumi dan Hasil-hasilnya		
	Ekspor	Impor	Sisa	Ekspor	Impor	Sisa
1971	1.233,6	1.102,8	130,8	755,7	1.082,4	- 326,7
1972	1.777,7	1.561,7	216,0	864,6	1.531,4	- 666,8
1973	3.210,8	2.729,1	481,7	1.602,7	2.685,3	-1.083,2
1974	7.426,3	3.841,9	3.584,4	2.214,9	3.658,9	-1.444,0
1975	7.102,5	4.769,8	2.332,7	1.791,7	4.516,3	-2.724,6
1976	8.546,5	5.673,1	2.873,4	2.542,4	5.235,4	-2.693,0
1977	10.852,6	6.230,3	4.622,3	3.554,8	5.498,3	-1.943,5
1978	11.643,2	6.690,4	4.952,8	4.204,7	6.110,7	-1.906,0
1979	15.590,1	7.202,3	8.387,8	6.719,2	6.409,0	+ 310,2
1980	21.908,9	10.834,4	11.074,5	9.050,1	9.090,4	- 40,3
1981: Januari	1.703,9	967,6	736,3	649,4	823,1	- 173,7
Pebruari	1.922,7	902,4	1.020,3	611,4	870,4	- 259,0
Maret	2.095,9	1.128,7	967,2	682,9	967,9	- 285,0
April	1.496,4	1.042,3	454,1	649,9	896,5	- 246,6

Sumber: Indikator Ekonomi (BPS, Juni 1981).

Seperti telah dikemukakan di depan bahwa telah tampak gejala-gejala perekonomian dunia akan mengalami perbaikan mulai tahun 1982. Diharapkan perkembangan ekonomi dunia akan dapat memberikan manfaat yang positif bagi perekonomian Indonesia melalui ekspor-impornya. Dalam tahun 1980, Jepang dan Amerika Serikat merupakan dua negara yang paling berpengaruh terhadap ekspor Indonesia, masing-masing memiliki bagian dari seluruh total ekspor sebesar sekitar 49,2% dan 19,6% (lihat Tabel 8). Menurut perkiraan OECD dalam tahun 1982 Jepang dan Amerika Serikat mampu meningkatkan perekonomiannya sebesar masing-masing 4% dan 1%. Melihat perkiraan tersebut, Indonesia sebaiknya mulai mempertimbangkan diversifikasi ekspornya. Peningkatan ekspor yang besar ke Jepang sebenarnya masih mungkin dilakukan akan tetapi mengingat pertumbuhan Amerika Serikat diperkirakan relatif kecil, sebaiknya ekspor Indonesia diarahkan ke negara-negara lain. Menurut perkiraan The Asian Wall Street Journal, negara-negara Hongkong, Korea Selatan dan Taiwan akan dapat mengalami tingkat pertumbuhan perekonomian yang relatif cukup tinggi yaitu masing-masing 7%: 8%: 7%. Demi kepentingan ekspor Indonesia di masa-masa men-

Tabel 8

EKSPOR INDONESIA MENURUT NEGARA-NEGARA TUJUAN, TAHUN 1979, 1980

Negara	1979			1980		
	Ribuan ton	Jutaan US\$	Bagian dari total (%)	Ribuan ton	Jutaan US\$	Bagian dari total (%)
ASEAN	11.236,6	2.232,5	14,32	12.562,7	2.759,3	12,59
Hongkong	391,8	99,1	0,64	530,0	152,0	0,69
Jepang	52.816,2	7.191,9	46,13	49.727,5	10.792,4	49,26
Asia Lainnya	7.058,4	806,7	5,17	5.367,5	801,5	3,66
Afrika	86,7	32,1	0,21	90,8	56,1	0,26
USA	18.928,9	3.170,7	20,34	15.640,9	4.303,3	19,64
Kanada dan Amerika lainnya	3.154,0	458,4	2,94	4.010,7	2.324,0	10,61
Australia dan Oceania	1.318,4	241	1,55	1.668,6	447,5	2,04
MEE	3.084,4	1.173,2	7,53	2.569,0	1.387,7	6,33
Rusia dan Eropa lainnya	192,6	184,5	1,18	344,4	258,7	1,18
Jumlah Ekspor	98.268,0	15.590,1	100,00	92.511,5	21.408,9	100,00

Sumber: Indikator Ekonomi, Juni 1981.

Cadangan devisa pada akhir tahun depan, pada saat ini belum dapat diperkirakan secara akurat sebab belum dapat diperkirakan besarnya jumlah pemasukan modal dari luar negeri baik yang berupa investasi swasta maupun pinjaman. Dengan bertitik tolak dari anggapan bahwa pada tahun 1982 tidak akan terjadi kegoncangan-kegoncangan politik yang berarti maka dapat diharapkan para investor tidak terlalu ragu-ragu untuk meningkatkan jumlah investasinya.

Meskipun demikian kesediaan negara-negara donor memberikan pinjaman jangka panjang dengan syarat lunak pada tahun depan diperkirakan akan berkurang. Alasan utama yang menyebabkan mereka bersikap demikian adalah karena Indonesia telah berhasil meningkatkan pendapatan masyarakatnya sehingga bantuan itu dirasakan tidak terlalu dibutuhkan lagi. Di samping itu kecenderungan-kecenderungan ini diperkuat oleh pandangan dari pemimpin negara-negara pemberi pinjaman yang telah berubah.

Di lain pihak, sebagian cadangan devisa terus akan dipergunakan untuk membiayai proyek-proyek besar yang dirintis sebelumnya dan sekarang sudah

PENUTUP

Dalam tahun 1982 keadaan perekonomian Indonesia akan mengalami beberapa masalah karena alasan-alasan baik dari luar maupun dalam negeri. Resesi dunia yang menyebabkan turunnya harga komoditi ekspor utama Indonesia di pasar internasional, serta dibekukannya harga minyak, merupakan faktor-faktor yang dominan yang harus diperhitungkan dan diantisipasi. Diselenggarakannya Pemilu Tahun 1982 menyebabkan pemerintah sulit mengambil langkah pengurangan subsidi dengan cara menaikkan harga, demi mempertahankan stabilitas politik yang mantap. Sesungguhnya cara ini wajar dilakukan mengingat beban subsidi yang bertambah berat terutama untuk bahan bakar minyak di satu pihak, tambahan pula dari sektor penerimaan negara tahun depan tidak dapat diharapkan kenaikan yang cukup besar. Kebijakan yang akan diambil mengenai perpajakan, penggunaan cadangan devisa, dan komposisi pengeluaran pemerintah akan menentukan tingkat inflasi tahun depan, yang diperkirakan sekitar tingkat yang dicapai pada tahun 1981.

Pada dasarnya tingkat pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan lebih kecil daripada yang dicapai dalam tahun 1981, namun angkanya masih lebih besar daripada yang ditargetkan dalam Pelita III. Demikian pula peningkatan ekspor seperti yang dicapai sebelum tahun 1980 tampaknya sulit untuk dipertahankan dalam tahun 1982. Meskipun demikian untuk mengimbanginya akan dilakukan pembatasan perkembangan impor dengan cara mendorong industri dalam negeri.

Proyeksi perekonomian Indonesia tahun 1982 ini masih bersifat kasar. Sebagian besar perkiraan ini dibuat bertitik tolak pada suatu anggapan dan situasi tertentu yang masih bisa berubah. Faktor-faktor yang paling menentukan dalam perekonomian nantinya adalah serangkaian tindakan dan kebijakan yang dilakukan dalam tahun 1982.